

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Pulau Sumatera Bagian Utara cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2015-2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018-2019. Nilai rata-rata kemandirian untuk pemerintah kabupaten adalah sebesar 9,08% dan pemerintah kota sebesar 19,13%. Pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera Bagian Utara tergolong dalam ke dalam daerah dengan pola hubungan instruktif atau kriteria kemampuan keuangan yang rendah sekali,

2. Rasio Efektivitas

Efektivitas keuangan daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera Bagian Utara dalam merealisasikan PAD tergolong efektif, namun cenderung mengalami fluktuasi. Untuk pemerintah kabupaten memiliki rata-rata efektivitas sebesar 108,09% dan pemerintah kota memiliki rata-rata efektivitas sebesar 94,63%. Dapat dilihat bahwa pemerintah kabupaten mendapatkan kriteria sangat efektif karena mendapatkan persentase 100% sedangkan pemerintah kota mendapatkan kriteria efektif karena belum mencapai 100%.

3. Rasio Aktivitas Belanja Rutin

Aktivitas pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Pulau Sumatera Bagian Utara dalam mengalokasikan dananya lebih dominan untuk belanja rutin, dilihat dari pemerintah kabupaten yang memiliki rata-rata belanja rutin sebesar 64,62% dan pemerintah kota memiliki rata-rata belanja rutin sebesar 74,24% dari total belanja daerah.

4. Rasio Aktivitas Belanja Modal

Aktivitas pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Pulau Sumatera Bagian Utara dalam memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja modal belum maksimal, dilihat dari pemerintah kabupaten yang memiliki rata-rata belanja modal sebesar 21,11% dan pemerintah kota memiliki rata-rata belanja modal sebesar 22,09% dari total belanja daerah.

5. Rasio Pertumbuhan

Pertumbuhan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Pulau Sumatera Bagian Utara cenderung mengalami fluktuasi bahkan mencapai trend negatif pada tahun 2018. Pemerintah kabupaten memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 14,77% dan pemerintah kota sebesar 10,78%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Pulau Sumatera Bagian Utara Periode 2015-2019 yang menghasilkan berbagai kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan saran yang berguna untuk:

1. Pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera Bagian Utara yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau diharapkan lebih meningkatkan PAD dengan cara mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dan mencari sektor-sektor guna meningkatkan PAD serta menyeimbangkan pembangunan untuk daerah kota dan kabupaten.
2. Pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera Bagian Utara perlu mempertahankan tingkat efektivitasnya seperti saat ini untuk pemerintah kabupaten dan pemerintah kota perlu meningkatkan efektivitasnya agar memenuhi kriteria sangat efektif. Realisasi penerimaan daerah harus lebih besar daripada target yang ditetapkan agar pemerintah selalu mendapatkan kriteria sangat efektif di tahun berikutnya.
3. Diharapkan pemerintah dapat meminimalisir anggaran daerahnya untuk belanja rutin agar dapat mengalokasikan anggaran daerahnya untuk belanja pembangunan agar dapat menambah sarana prasarana dan

infrastruktur yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan kegiatan perekonomian masyarakat kabupaten dan kota di Pulau Sumatera Bagian Utara.

4. Diharapkan pemerintah melakukan program dan kegiatan-kegiatan yang mendorong meningkatkan penerimaan daerah sehingga pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat memiliki trend positif dan terus meningkat setiap tahunnya.
5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian tentang analisis kinerja keuangan daerah. Untuk peneliti selanjutnya agar lebih bervariasi seperti DSCR (Debt Service Coverage Ratio), tingkat ketergantungan, efisiensi PAD, dan desentralisasi fiskal, ruang fiskal daerah. Penelitian di Pulau Sumatera Bagian Utara masih jarang dilakukan sehingga dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.